

Judul : Revisi UU HAM, komisi XIII akan fokus ke kepentingan rakyat
Tanggal : Selasa, 02 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU HAM Komisi XIII Akan Fokus Ke Kepentingan Rakyat



Willy Aditya

KETUA Komisi XIII DPR Willy Aditya berharap, revisi UU HAM bisa memperkuat perlindungan hak warga negara. Revisi ini akan berfokus pada perluasan promosi, perlindungan, pemenuhan, serta penghormatan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat di Indonesia.

Kehadiran Kementerian HAM bersama sejumlah komisi nasional terkait HAM, lanjutnya, menjadi momentum memperkuat pemajuan HAM di Indonesia. Pembagian tugas antara kementerian dan lembaga independen bakal meningkatkan kualitas perlindungan HAM bagi masyarakat.

Menurutnya, revisi UU HAM yang dikerdilkan jadi sekadar bicara kewenangan sektoral lembaga negara justru tidak menguntungkan. "Fokus utama pergerakan ini harus ditujukan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan lembaga negara semata dalam menjalankan tugas serta fungsinya di masa depan," terangnya, Jumat (29/5/2026).

Komisi XIII DPR, sambung Willy, akan menjalankan fungsi legislasi sehingga bisa memastikan revisi UU HAM benar-benar memperkuat promosi, perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM di Indonesia. Dalam proses pembahasan revisi UU ini, DPR juga menjalin akan membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya.

Berbagai masukan dan perdebatan di ruang publik, lanjutnya, merupakan bagian dari proses penyempurnaan rancangan UU itu. Sejumlah poin memang bersifat progresif, namun ada pula aspek yang perlu diperkuat atau diubah. Sehingga DPR akan membuka kesempatan seluas-

luasnya untuk keterlibatan publik yang lebih luas.

Dia bilang, masyarakat, lembaga, maupun individu yang memiliki perhatian pada isu HAM, bisa menyampaikan masukan melalui berbagai mekanisme yang disiapkan DPR. "Bisa dilakukan melalui media daring maupun forum rapat resmi, sehingga silakan menyiapkan catatan dan masukan untuk pembahasan di DPR," jelasnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pereira mengingatkan agar revisi UU HAM tidak mengganggu independensi Komnas HAM. Catatan yang disampaikan Komnas HAM terkait potensi intervensi kekuasaan dalam draf revisi UU HAM perlu diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang.

Independensi Komnas HAM, kata Andreas, harus tetap dijaga agar lembaga itu bisa menjalankan tugasnya secara optimal dalam melindungi HAM. Komisi itu harus independen, serta bebas dari intervensi kekuasaan agar bisa melaksanakan tugas dengan baik untuk melindungi serta mencegah terjadinya pelanggaran HAM.

Dia mengaku, hingga kini draf revisi UU HAM belum masuk ke Komisi XIII DPR untuk dibahas. Beleid itu diduga masih dibahas antar kementerian dan lembaga di internal Pemerintah. "Karena revisi UU ini masuk Prolegnas sebagai inisiatif Pemerintah dan masih pembahasan lintas Kementerian/Lembaga," ungkapnya.

Terkait revisi UU ini, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mendesak penyusunan dan pembahasannya dilakukan dengan transparan dan berlandaskan etika baik. Itu dilakukan demi meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Konstitusi UUD 1945.

Dia meminta tetap ada pemisahan peran dan fungsi antara Komnas HAM sebagai lembaga mandiri dan Kementerian HAM sebagai lembaga eksekutif pembantu presiden. Batas yang jelas antara keduanya akan menciptakan relasi kelembagaan yang sehat dan konstruktif dalam memajukan agenda hak asasi manusia. ■ PVB